

EKSPLOITASI EKONOMI ATAS ETNIS UIGHUR OLEH PEMERINTAH TIONGKOK DENGAN PEMBERLAKUAN KERJA PAKSA DI PABRIK- PABRIK SWASTA DI TIONGKOK

Daniel Purba, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: d.purba32@gmail.com

Anak Agung Sri Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: cbs.sriutari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan hukum pemberlakuan kerja atas etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang digolongkan sebagai kerja paksa, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya mempekerjakan etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang yang masuk kualifikasi eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ketiganya dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Tiongkok telah terindikasi melakukan tindakan kerja paksa bagi etnis minoritas Uighur atas dipekerjakannya mereka di pabrik-pabrik swasta yang berafiliasi dengan pemerintah dengan pengawasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kuat sehingga eksploitasi atas dasar ekonomi juga pasti terjadi di antara tindakannya tersebut, atas dasar itu lah Pemerintah Tiongkok dan pelaku usaha atas pabrik yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang dilakukannya atas etnis Uighur.

Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi, Etnis Minoritas Uighur, Kerja Paksa.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the legal rules of enforcing work for ethnic Uighurs in Xianjiang factories classified as forced labor, and to find out and analyze the efforts to employ ethnic Uighurs in Xianjiang factories who qualify for economic exploitation. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. This research consisted of 3 legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, all of which were collected using document study techniques. All legal materials were subsequently analyzed using qualitative methods. Based on the results of this study, it can be concluded that the Chinese government has indicated that it has committed acts of forced labor for ethnic Uighur minorities for their employment in private factories affiliated with the government with strong supervision and violations of human rights so that exploitation on an economic basis is also certain to occur. Among these actions, it is on that basis that the Chinese Government and the business actors of the factory are fully responsible for everything they do for ethnic Uighurs.

Keywords: Economic Exploitation, Uighur Ethnic Minority, Forced Labor.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Terhitung dari 2 dekade ke belakang, Republik Tiongkok telah menunjukkan dirinya terhadap dunia internasional sebagai salah satu negara paling berpengaruh di muka bumi, dengan pencapaian-pencapaian besar terhadap teknologi dan ekonomi. Hal tersebut, memposisikan Tiongkok menjadi pusat kekuatan baru dunia atas ciri bahwa segala sesuatu yang Tiongkok lakukan selalu menjadi perhatian masyarakat dunia, terlebih pada kejadian-kejadian yang cukup genting.¹ Permasalahan-permasalahan dalam negeri Tiongkok tak pelak menjadi acuan bagi kestabilan ekosistem dunia karena tidak dapat dipungkiri bahwa Tiongkok mempunyai peran dan andil yang besar terhadap kelangsungan dunia. Salah satunya yang marak saat ini di perbincangkan adalah didirikannya *Xianjiang re-education camps*, atau bernama resmi *Vocational Education and Training Centers*.

Xianjiang, salah satu provinsi terbesar di Tiongkok yang telah menjadi rumah bagi jutaan warga beretnis Uighur dimana mayoritas penduduk wilayahnya beragama Islam. Sejak tahun 1940, etnis-etnis minoritas di Xianjiang telah bersenggolan dan menimbulkan beberapa konflik dengan Pemerintah Tiongkok, yang salah satunya gaungan penentangan dan perlawanan etnis Uighur yang tidak sepaham dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh Tiongkok.² Hal-hal tersebut banyak menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti kekerasan yang represif dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, terlebih atas etnis minoritas, atas sebab itulah, Pemerintah Tiongkok menganggap bahwa etnis minoritas tersebut, yang salah satu populasinya terbesar adalah etnis Uighur sebagai pemberontak dan perlu di perhatikan dan diawasi lebih lanjut.

Atas dasar itulah, pendirian *re-education camps* di Xianjiang menjadi salah satu cara untuk menahan arus perlawanan yang dilakukan oleh etnis Uighur, konsep kamp tersebut telah meruak dikalangan pejabat Tiongkok sejak tahun 2014³ dimana bertujuan untuk indoktrinasi politik melalui penahanan dan perampasan kebebasan dari etnis Uighur, tidak pelak beberapa laporan menyatakan bahwa dalam kamp tersebut telah terjadi kekerasan secara represif berupa penyiksaan dan perampasan hak-hak berfikir dan beragama.⁴ Menurut PBB, pada tahun 2018, diperkirakan bahwa pihak berwenang Tiongkok menahan ratusan ribu sampai satu juta warga beretnis Uighur, Kazakh, Kyrgyz, dan Etnis Muslim Turki.⁵ Tindakan Pemerintah Tiongkok tersebut tidak dibenarkan menurut hukum

¹ Song, Tao, Liu, Weidong, Liu, Zhigao, dan Wurhati, Yeerken. "Policy Mobilities and the China Model: Pairing Aid Policy in Xianjiang", MDPI Journal Sustainability, Vol. 11, No. 3496 (2019):3.

² Ismira, Andi, "Xianjiang Human Rights Violation and Radicalism Issues: A Development Inequality Framing", Mandala, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 1 (2019):23.

³ Adrian Zenz, *New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xianjiang*, China Brief, Vol. 18, Issue 10 (2018):18.

⁴ Rakhima, Ayu Suci, dan Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah, *Gross Violations of Human Rights Veiled Within Xianjiang Political Reeducation Camps*, Journal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 1 (2019):2-3.

⁵ Nebehay, Stephanie, "U.N. says it has credible reports that China holds million Uighurs in secret camps", (2018), URL: <https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/u-n-says-it-has-credible-reports-that-china-holds-million-uighurs-in-secret-camps-idUSKBN1KV1SU>, Diakses pada 2 Januari 2021.

internasional karena melanggar hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 9(1) *International Covenant on Civil and Political Rights*, dimana setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dimana tak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar dan prosedur yang jelas ditetapkan oleh hukum.

Pemerintah Tiongkok percaya bahwa pendirian kamp edukasi di Xianjiang dengan target etnis dan agama minoritas akan membuatnya berasimilasi dengan pola pikir dan arus adat budaya Han China, dengan pelarangan melaksanakan adat dan kegiatan religiusnya masing-masing yang dimana tujuan utama sebagai alibi atas upaya stabilisasi dan kontrol daerah Xianjing beserta etnisnya. Sehingga, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dimana setiap orang berhak dan tidak boleh dipaksakan atas agama dan kepercayaan yang dipercayainya sesuai dengan pasal 18 ICCPR. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Tiongkok melalui kamp edukasinya digadang-gadang mempekerjakan etnis minoritas Uighur di pabrik-pabrik yang berafiliasi dengan pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan dengan mengubah mata pencaharian etnis uighur yang semula bersifat tradisional menjadi pekerjaan lain yang lebih modern, salah satunya adalah industrial.⁶

Diperkirakan sekitar lebih dari 80,000 etnis Uighur di pindahkan keluar dari Xianjiang untuk bekerja di pabrik-pabrik yang tersebar diseluruh Tiongkok antara tahun 2017 dan 2019, dan sebagian besar pabrik tersebut bergerak dalam bidang pemroduksian tekstil dan bahan-bahan pakaian lainnya dimana beberapa dari mereka dikirim langsung dari kamp edukasi. Bagi etnis Uighur yang dipindahkan keluar Xianjiang atau tetap berada di Xianjiang, mereka diperlakukan tidak jauh berbeda, dimana tetap ditempatkan di dormitori yang telah disediakan yang mengharuskan mereka menggunakan bahasa dan adat china beserta pelatihan ideologi diluar jam kerjanya, tetap diawasi dengan ketat dan dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jelas, hal tersebut juga melanggar ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya. beberapa dari mereka yang dipindahkan untuk bekerja dibayar dengan sangat rendah bahkan tidak mendapatkan bayaran sekalipun, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang pemikiran pengkerja paksaan yang dimana berpotensi pada skala yang signifikan demi pemenuhan ekspektasi Pemerintah China akan kemajuan ekonomi dan penambahan pemasukan keuntungan negara.

Atas dasar itulah, Pemerintah Tiongkok telah dianggap melanggar ketentuan dan aturan yang jelas tercantum dalam *International Labour Organization Convention on Forced Labour, 1930 (No.29)*, yang selanjutnya disebut Konvensi ILO, dan *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention*, yang selanjutnya disebut Protocol 2014. Karena dengan kesengajaannya, menyelewengkan kewajibannya atas para pekerja dimana tidak dihargai dan dihormatinya kesetaraan yang adil dalam memenuhi hak-hak dari para pekerja yang bersangkutan. Bentuk-bentuk pelarangan kegiatan keagamaan, pemaksaan suatu ideologi atau ajaran, dan tidak mendapatkan upah sesuai semesti dan sewajarnya merupakan yang menjadi sorotan dalam permasalahan ini.

⁶ Human Rights Watch, "How Mass Surveillance Works in Xianjiang, China", (2019), URL: <https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2019/05/02/china-how-mass-surveillance-works-xinjiang>, diakses pada 3 Januari 2021.

Tidak menutup kemungkinan, atas perlakuan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dalam mempekerjakan warga etnis minoritas, yaitu Uighur secara tidak manusiawi dan dipaksakan dengan membatasi segala hak dan ruangannya, menimbulkan permasalahan baru, yaitu terdapatnya eksploitasi ekonomi yang terjadi imbas pengkerja paksaan yang dilakukan. Pemanfaatan secara sepihak oleh Pemerintah Tiongkok atas etnis Uighur atas dasar kepentingan ekonomi tanpa dipertimbangkannya asas keadilan, kepatutan dan kesejahteraan yang memadai cukup menjadi dasar yang kuat untuk digunakan dalam menjerat dan melabelkan Pemerintah Tiongkok sebagai pengeksploitasian ekonomi warga etnis Uighur. Berkenaan atas hal yang telah dipaparkan diatas, maka penulis hendak mengkaji melalui tulisan yang berjudul "EKSPLOITASI EKONOMI ATAS ETNIS UIGHUR OLEH PEMERINTAH TIONGKOK DENGAN PEMBERLAKUAN KERJA PAKSA DI PABRIK-PABRIK XIANJIANG." Dalam menjamin originalitas penulisan artikel ilmiah ini penulis melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji dalam artikel ilmiah ini yakni:

- a. Artikel ilmiah yang berjudul "*Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*" yang dibuat oleh Josep Robert Khuana pada tahun 2020 yang meneliti mengenai perlindungan hukum tenaga kerja migran dengan menyangkut dengan perspektif hukum internasional.
- b. Artikel ilmiah yang berjudul "*Gross Violations of Human Rights Veiled Within Xianjiang Political Reeducation Camps*" yang dibuat oleh Ayu Suci Rakhima pada tahun 2019 yang meneliti mengenai pelanggaran berat dalam sisi hak asasi manusia mengenai kamp edukasi di Xianjiang oleh Pemerintah Tiongkok.

Kedua penelitian diatas meneliti dari sudut pandang permasalahan yang berbeda, dimana pada poin (a) membahas mengenai perlindungan hukum tenaga kerja yang banyak mendapat ketidakadilan, namun dalam perspektif pekerja migran, sementara, poin (b) menitik beratkan pembahasan kepada kejahatan luar biasa atas hak asasi manusia. kemudian, penelitian artikel ilmiah ini merupakan penggabungan keduanya namun dengan perspektif permasalahan yang berbeda, pembahasan tenaga kerja yang dipaksakan hak dan ruangannya menjadi acuan, namun tetap berada dalam satu wilayah yang sama bukan sebagai migran dan tidak hanya pembahasan mengenai hak asasi manusia saja, tetapi juga hak-haknya sebagai pekerja yang tidak dihargai dan dihormati sesuai semestinya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum pemberlakuan kerja atas etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang digolongkan sebagai kerja paksa?
2. Apakah dengan mempekerjakan etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang termasuk sebagai eksploitasi ekonomi?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan artikel ilmiah yang berbasis pada penelitian, harus memuat tujuan dari diadakannya penelitian berdasarkan judul yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan hukum pemberlakuan kerja atas etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang digolongkan

sebagai kerja paksa, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya mempekerjakan etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang yang masuk kualifikasi eksploitasi ekonomi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan atas penulisan artikel ilmiah ini yaitu metode penelitian akan hukum normative,⁷ yang acuannya terfokus pada aturan-aturan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ketiganya dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aturan hukum pemberlakuan kerja atas etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang oleh Pemerintah Tiongkok digolongkan sebagai kerja paksa

Republik Rakyat Tiongkok dewasa ini berusaha untuk merubah sistem perekonomian masyarakatnya menuju ke sektor yang lebih maju dan modern seperti produksi massal manufaktur dengan kualifikasi tinggi, seperti yang tercatat pada *made in China policy 2025*⁸ dimana diperlukannya pergeseran dari manufaktur pakaian jadi sektor seperti kedirgantaraan, informasi dan komunikasi teknologi, peralatan dan perlengkapan perkeretaan yang canggih, serta peralatan pertanian. Terlepas dari ambisi ini, produksi kapas, tekstil, dan pakaian masih memainkan peran yang penting dalam perekonomian Tiongkok. Pada 2019, terdapat sekitar 3,1 juta karyawan di industri tekstil China dimana menyumbang sebanyak 1,9% dari total GDP keseluruhan Republik Rakyat Tiongkok dengan produksi ekspor tekstil, pakaian jadi, benang, dan baku mendominasi pasar ekspor global sebanyak 31,6%, yang menjadikannya pengeksport tekstil terbesar di dunia.⁹

Hal tersebutlah membuat Tiongkok banyak memiliki pabrik-pabrik di beberapa provinsi yang memang dikhususkan untuk daerah industri, seperti salah satunya adalah provinsi Xianjiang dimana banyak etnis minoritas, seperti etnis Uighur bermukim. Sekiranya menurut laporan dari *Australian Strategic Policy Institute*¹⁰ terdapat terdapat 27 pabrik yang tersebar dari seluruh penjuru Tiongkok yang menggunakan pekerja etnis Uighur, seluruh pabrik tersebut merupakan pemasok 82 merek terkenal dunia. Sangat sulit bagi etnis Uighur untuk menolak atau melarikan diri dari tugas kerja tersebut dikarenakan keterkaitannya dengan aparat dengan adanya penahanan dan indoktrinasi politik baik di dalam maupun di luar Xianjiang. Yang paling mencolok adalah, pemerintah daerah

⁷ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008): 33

⁸ South China Morning Post, "Made in China 2025: how Beijing plans to lead the world", (2015), URL: <https://www.scmp.com/business/china-business/series/3101581/made-china-2025-how-beijing-plans-lead-world>, Diakses pada 4 Januari 2021.

⁹ Lehr, Amy, "Addressing Forced Labor in the Xianjiang Uyghur Autonomous Region", CSIS Brief & Report (2020): 4.

¹⁰ Xu, Vicky Xiuzhong, "Uyghurs for sale: re-education, forced labour and surveillance beyond Xianjiang", Policy Brief, Rep. No. 26 (2020): 04.

setempat dan perantara swasta dibayar dengan harga per kepala oleh Pemerintah Provinsi Xianjiang untuk mengatur penugasan tenaga kerja, sesuai dengan laporan kerja pemerintah pada 2019¹¹ yang menyatakan bahwa “untuk setiap angkatan pekerja yang dilatih, dimana satu kelompok pekerjaan akan diatur dan satu kelompok sisanya akan di transfer, mereka yang bekerja perlu menerima pendidikan ideologis yang menyeluruh dan tetap dalam pekerjaan mereka.”¹²

Konvensi ILO sendiri, dalam Pasal 2 menjelaskan kerja paksa sebagai “semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapapun di bawah ancaman hukuman apapun dengan tidak adanya penawaran atas dirinya secara sukarela.” Dengan indikatornya adalah penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan gerak, isolasi, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penyimpanan dokumen identitas, pemotongan gaji, jeratan hutang, kondisi kerja dan hidup yang dilecehkan, beserta lembur yang berlebihan. Siapapun bisa menjadi korban kerja paksa, namun dalam hal ini seseorang yang kurang dalam akses pendidikan dan hukum memiliki sedikit pilihan mata pencaharian, kemudian, kelompok agama dan etnis minoritas tertentu juga merupakan kelompok rentan akan terjadinya kerja paksa.

Kemudian, tindakan tersebut juga tidak berdasar dan dibenarkan menurut konvensi ILO sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 dimana diberikannya pengecualian atas suatu kerja apabila pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang:

- a. bersifat wajib militer;
- b. bersifat kesukarelaan dari warga negara atas kewajiban sipil warga negara;
- c. akibat hukum dari adanya putusan pengadilan, yang tidak dipekerjaan untuk kepentingan perorangan, perusahaan atau asosiasi swasta;
- d. bersifat darurat, seperti perang, bencana luar biasa, kebakaran, banjir, kelaparan, dan hal lainnya yang akan membahayakan keberadaan atau kesejahteraan seluruh atau sebagian populasi;
- e. kesukarelaan atas layanan masyarakat dalam suatu komunitas.

Dari klasifikasi yang telah dijabarkan di Pasal 3 tersebut, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dalam tindakannya mempekerjakan etnis Uighur di pabrik-pabrik Tiongkok, karena tidak ada alasan secara pasti yang dijelaskan secara langsung oleh Pemerintah Tiongkok, ditambah, pekerjaan tersebut menjadi faktor penguntung bagi Pemerintah Tiongkok karena mempekerjakannya untuk suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang-bidang yang telah disebutkan sebelumnya.

Seharusnya Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Daerah itu sendiri diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerja paksa, sesuai dengan Protokol 2014, Pasal 2, dengan cara sebagai berikut:

¹¹ China.org, “Work report of the People’s Government of Moyu county in 2019” , (2019), URL: http://www.china.org.cn/chinese/2019-03/21/content_74593207.htm, diakses pada 5 Januari 2021.

¹² Khuana, Josep Robert, “Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional.”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 8 (2020): 127.

- a. mendidik dan menginformasikan kepada masyarakat, terutama mereka yang dianggap sangat rentan, untuk mencegah mereka menjadi korban paksa atau kerja wajib;
- b. mendidik dan menginformasikan pengusaha, untuk mencegah mereka terlibat dalam praktik kerja paksa;
- c. melakukan upaya untuk memastikan bahwa:
 - (i) cakupan dan penegakan undang-undang yang relevan dengan pencegahan kerja paksa termasuk undang-undang ketenagakerjaan yang sesuai, berlaku untuk semua pekerja dan semua sektor ekonomi; dan
 - (ii) layanan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang ini diperkuat;
- d. melindungi orang, terutama pekerja migran, dari kemungkinan praktik-praktik yang kasar dan curang selama proses perekrutan dan penempatan;
- e. mendukung uji tuntas oleh sektor publik dan swasta untuk mencegah dan menanggapi risiko kerja paksa;
- f. mengatasi akar penyebab dan faktor yang meningkatkan risiko kerja paksa.

Pemerintah Tiongkok justru melakukan hal yang sebaliknya, sehingga atas dasar ini lah suatu pemerintahan dianggap tidak tanggap akan kebutuhan pekerja disuatu negara, karena tidak memperhatikan hal-hal seperti yang telah disebutkan. Tidak terkecuali, Pemerintah Tiongkok dan pemerintahan daerah Xianjiang. Walaupun Republik Rakyat Tiongkok belum meratifikasi Konvensi ILO, namun sebagai anggota dari ILO, Tiongkok berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak menghalangi tujuan dari konvensi ILO, namun, hal yang mengikat bagi Tiongkok adalah, keharusannya dalam taat dan tunduk terhadap *Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* dari ILO yang telah diratifikasinya pada tahun 1960. Jelas diatur dalam konvensi tersebut bahwa suatu negara diharuskan tidak melakukan tindak diskriminasi atas pekerja, dimana tercantum dalam Pasal 1 (a) bahwa setiap perbedaan, pengecualian, atau perferensi yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, ekstraksi kebangsaan atau asal-usul sosial, yang memiliki efek meniadakan atau membedakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan. Etnis Uighur sebagai etnis minoritas di Tiongkok dengan agama yang berbeda dengan kebanyakan warga negara Tiongkok dalam hal ini menjadi subjek yang rentan dan tidak seharusnya diperlakukan tidak adil dan dibedakan, terlebih dalam pembahasan mengenai ketenaga kerjaan.

2.1. Eksploitasi Ekonomi Oleh Pemerintah Tiongkok atas Etnis Uighur dengan Mempekerjakan Etnis Uighur di Pabrik-Pabrik Xianjiang

Selain terindikasi bahwa Pemerintah Tiongkok melakukan tindakan kerja paksa bagi Etnis Uighur, terdapat juga indikasi lain yang saling keterkaitan satu sama lain dengan kerja paksa, yaitu, adanya indikasi bahwa Pemerintah mengeksploitasi hak etnis Uighur atas dasar keuntungan semata. Sebelumnya berlanjut, alangkah baiknya mengetahui definisi dari eksploitasi ekonomi, dimana 'ekonomi' menyiratkan bahwa terdapatnya kepentingan

material, berupa keuntungan tertentu yang dihasilkan dari produksi, distribusi atau konsumsi barang dan jasa yang dimana dapat berdampak pada ekonomi negara, komunitas, atau individu, kemudian eksploitasi merupakan pengambilan keuntungan dengan cara tidak adil dari orang lain untuk kepentingan dan keuntungannya pribadi, lebih khusus lagi, hal tersebut juga termasuk sebagai pemanipulasian, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan atau perlakuan buruk dengan rasa tidak hormat atas hak dan martabat dari manusia.¹³ Eksploitasi ekonomi itu sendiri disebabkan oleh perbedaan sumber daya, aset atau keterampilan, dimana pengeksploitasian berkontribusi pada perbuatan atau tindakan ketidaksetaraan yang biasanya bersifat struktural.¹⁴

ILO sendiri memperkirakan setidaknya dalam waktu hingga saat ini terdapat kurang lebih 12.3 juta orang di seluruh dunia yang menjadi korban dari ketidakadilan atas eksploitasi, yang dalam hal ini lebih mengacu kepada kerja paksa,¹⁵ dengan mayoritas korban dieksploitasi dengan alasan ekonomi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi atas dasar ekonomi sering terjadi di penjuru dunia tanpa memandang aspek-aspek yang dapat merugikan suatu individu atau kelompok, hanya demi kepentingan dan keuntungan sesaat. Sama halnya, dengan yang terjadi oleh kelompok rentan seperti etnis minoritas Uighur. Kemudian, menurut laporan dari ASPI, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa etnis minoritas Uighur dipekerjakan secara paksa dengan diharuskan mematuhi segala aturan yang tidak menjadi perhatian dari Uighur dengan paksaan dan larangan atas kebudayaan dan ajaran kepercayaan dari etnis Uighur, juga ketidaksetaraan dan pembedaan yang terjadi.

Sebagai contoh, Etnis Uighur bekerja di Pabrik sepatu Taekwang pada October 2019, pabrik tersebut merupakan pemasok utama dari salah satu brand sepatu paling terkenal di dunia. Dimana, pada Januari 2020, sekitar 600 etnis minoritas Uighur yang berasal dari kamp edukasi Xianjiang bekerja di pabrik tersebut, yang mayoritasnya berjenis kelamin perempuan dengan pelabelan oleh Pemerintah Tiongkok sebagai 'pembelok' dan 'ekstrimis keagamaan'. Dipabrik tersebut, pekerja Uighur membuat sepatu pada siang hari, yang kemudian pada malam harinya, mereka menghadiri sekolah malam untuk belajar bahasa mandarin, menyanyikan lagu kebangsaan Tiongkok, dan menerima 'pelatihan kejuruan' beserta 'pendidikan patriotik'. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka pelajari di kamp edukasi Xianjiang sebelumnya.

Kemudian, individu yang dirasa telah 'lulus' dari kamp edukasi Xianjiang telah dilaporkan dikirim secara angung ke pabrik-pabrik afiliasi pemerintah untuk bekerja dengan tekanan yang telah disebutkan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa keadaan seperti itu, kecil kemungkinan kerja mereka bersifat secara sukarela. Fakta barunya adalah, sebuah pabrik bernama AYP di Tiongkok, pada februari 2018 memindahkan

¹³ Hof, Simone Van Der, d.k.k, "The Child's Right to Protection Against Economic Exploitation in the Digital World.", *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 28, Issue 4 (2020): 8-9.

¹⁴ Ferguson, Benjamin dan Vrousalis, Nicholas, "Exploitation and the Social Economy.", *Review of Social Economy*, Vol. 77, No. 2 (2019): 91.

¹⁵ International Labour Organization, "A Global Alliance Against Forced Labour", *International Labour Conference*, 93rd Sess, Rep. 1 (B) (2005): 9.

63 pekerja, kemudian saat ini tercatat sudah sebanyak 500 pekerja yang dipindahkan.¹⁶ Sementara itu, pada 2017, suatu pabrik penyuplai komponen elektronik dari salah satu merek telepon seluler paling terkenal di dunia, memindahkan sekitar 700 orang Uighur ke Pabriknya. Namun, saat ini, menurut seorang pekerja Uighur yang pernah bekerja di pabrik tersebut mengatakan bahwa ada lebih dari seribu pekerja Uighur di pabrik tersebut.¹⁷

Warga Uighur yang bekerja di pabrik tidak diizinkan pulang untuk liburan, dan juga pabrik tersebut tidak seperti pabrik pada umumnya, karena dilengkapi dengan menara pengawas, kawat silet, dan pagar kawat berduri yang menghadap ke dalam, makan terpisah dengan pegawai lainnya, tempat tinggal yang terpisah dan dibedakan dengan para pekerja Tiongkok lain¹⁸ petinggi pabrik juga mempekerjakan orang untuk mengawasi segala aktifitas yang dilakukan oleh para pekerja Uighur, karena tidak ingin pekerja Uighur berbelok dari apa yang telah di ajarkan kepada mereka. Tindakan-tindakan tersebut sangat mencerminkan bahwa Pemerintah Tiongkok melanggar hak-hak warga etnis minoritas dalam berbagai hal dan aspek dengan tidak adanya itikad untuk mencegah dan melindungi warga tersebut, terlebih dalam hal ketenagakerjaan.

Partisipasi pekerja Uighur dalam program ketenagakerjaan tersebut banyak yang tidak bersifat sukarela, bahkan pada tahun 2000-an, jauh sebelum kamp edukasi dibuat, kondisi kerja dan kehidupan bagi pekerja etnis Uighur yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sering kali eksploitatif, bahkan beberapa melecehkan.¹⁹ Dengan tidak menimbang hal lainnya, otoritas terkait dengan sengaja mengeluarkan etnis Uighur dari tempat tinggal dan cara hidup tradisional mereka, hanya untuk memaksa mereka menanggung beban dan jam kerja yang panjang beserta kondisi yang buruk dari para petinggi di tempat kerja mereka, juga sikap diskriminatif yang mereka dapat dari rekan kerja non-uighur ataupun dari otoritas yang bertugas.

Perkembangan yang masif dari sistem ketenagakerjaan bagi etnis Uighur di Xianjiang menghadirkan persoalan bagi merek-merek terkenal yang terlibat, karena dengan tindakan pabrik yang bersangkutan terhadap etnis minoritas Uighur, merek tersebut juga terindikasi atas pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan dan hak asasi manusia di dalamnya. Ditambah, reputasi yang telah merek tersebut bangun selama ini beserta hukum terkait dengan praktik perburuhan yang dipaksakan, diskriminatif, eksploitasi dengan tindakan yang represif. Ditambah, selama tiga tahun terakhir sistem kamp edukasi Xianjiang oleh Pemerintah Tiongkok telah menuai kecaman

¹⁶ Kunming Training School Cost Alliance, "Guangdong aids Xianjiang actively promotes the transfer of aided labor force to the mainland and the effect is obvious", URL: <http://archive.ph/70yK7>, Diakses pada 8 Januari 2021.

¹⁷ Asia Heart Network, "Luopu County, Xianjiang: Outstanding Industrial workers return to their hometowns as excellent preachers", URL: <http://archive.ph/qEvOK>, Diakses pada 8 Januari 2021.

¹⁸ Fifield, Anna, "China Compels Uighur to Work in Shoe Factory that Supplies Nike", The Washington Post, URL: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-compels-uighurs-to-work-in-shoe-factory-that-supplies-nike/2020/02/28/ebddf5f4-57b2-11ea-8efd-0f904bdd8057_story.html, diakses pada 8 Januari 2021.

¹⁹ Congressional-Executive Commission on China, "2018 Annual Report", 115 Congress, 2nd Sess (2018): 8.

internasional, yang diperparah saat ini dengan budaya kerja paksa yang dilakukan kepada etnis minoritas Uighur pula.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa dengan diadakannya kamp edukasi Xianjiang oleh Pemerintah Tiongkok membawa Tiongkok menjadi salah satu negara yang berperan dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia, karena telah membatasi dan melarang sesuai yang telah diterima oleh setiap manusia sedari ia lahir, yaitu hak untuk hidup dan hak-hak penunjang lainnya sebagai penunjang kehidupannya. Ditambah, pengiriman pada pekerja etnis Uighur kepada pabrik-pabrik yang berafiliasi dengan pemerintah untuk dipekerjakan dengan aturan dan batasan yang cukup tidak masuk akal dilakukan untuk struktural pekerja dan pemilik usaha, sehingga, dengan ini Pemerintah Tiongkok dan pabrik yang bersangkutan terindikasi melanggar Konvensi ILO dan Protokol 2014, beserta Konvensi yang ia telah ratifikasi sendiri yaitu *Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*. Selain itu, indikasi lain atas eksploitasi ekonomi dengan bukti-bukti yang telah memberatkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemerintah Tiongkok atas tindakan pengkerja paksaan atas Etnis Uighur dilakukan dengan cara mengeksploitasi atas dasar ekonomi. Saran yang dapat penulis berikan adalah, diharuskannya Pemerintah Tiongkok menjung tinggi hak-hak sipil, budaya dan ketenaga kerjaan yang diabadikan dalam konstitusi dan undang-undang domestik Tiongkok, mengakhiri penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum terhadap Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xianjiang, dan memastikan bahwa semua warga negara dapat dengan bebas menentukan persyaratan dan kualifikasi dirinya sendiri atas tenaga kerja dan mobilitas individu. Kemudian, perusahaan yang terkait diharuskan melakukan uji tuntas secara menyeluruh pada seluruh pabrik yang terindikasi, agar pekerja Uighur dan minoritas lain yang terdampak kerugina tidan terkena lebih lanjut, sehingga praktik kerja paksa dan eksploitasi bisa dihindarkan, bahkan dengan itikad baik dan usaha, dapat di hilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008)

Jurnal

Adrian Zenz, *New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xianjiang*, China Brief, Vol. 18, Issue 10 (2018).

Ferguson, Benjamin dan Vrousalis, Nicholas, "Exploitation and the Social Economy.", *Review of Social Economy*, Vol. 77, No. 2 (2019).

Hof, Simone Van Der, d.k.k, "The Child's Right to Protection Against Economic Exploitation in the Digital World.", *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 28, Issue 4 (2020).

Ismira, Andi, "Xianjiang Human Rights Violation and Radicalism Issues: A Development Inequality Framing", *Mandala, Jurnal Hubungan Internasional*, Vo. 2, No. 1 (2019).

Khuana, Josep Robert, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional.", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 8 (2020).

Rakhima, Ayu Suci, dan Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah, *Gross Violations of Human Rights Veiled Within Xianjiang Political Reeducation Camps*, *Journal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 1 (2019).

Song, Tao, Liu, Weidong, Liu, Zhigao, dan Wurhati, Yeerken. "Policy Mobilities and the China Model: Pairing Aid Policy in Xianjiang", *MDPI Journal Sustainability*, Vol. 11, No. 3496 (2019).

Konvensi Internasional

Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation

International Covenant on Civil and Political Rights

International Labour Organization Convention on Forced Labour, 1930 (No.29)

Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention

Laporan Internasional

Congressional-Executive Commission on China, "2018 Annual Report", 115 Congress, 2nd Sess (2018).

International Labour Organization, "A Global Alliance Against Forced Labour", International Labour Conference, 93rd Sess, Rep. 1 (B) (2005).

Lehr, Amy, "Adressing Froced Labor in the Xianjiang Uyghur Autonomous Region", CSIS Brief & Report (2020).

Xu, Vicky Xiuzhong, "Uyghurs for sale: re-education, forced labour and surveillance beyond Xianjiang", Policy Brief, Rep. No. 26 (2020).

Internet

Asia Heart Network, "Luopu County, Xianjiang: Outstanding Industrial workers return to their hometowns as excellenct preachers", URL: <http://archive.ph/qEvOK>.

China.org, "Work report of the People's Government of Moyu county in 2019" , (2019), URL: http://www.china.org.cn/chinese/2019-03/21/content_74593207.htm.

Fifield, Anna, "China Compels Uighur to Work in Shoe Factory that Supplies Nike", The Washington Post, URL: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-compels-uighurs-to-work-in-shoe-factory-that-supplies-nike/2020/02/28/ebddf5f4-57b2-11ea-8efd-0f904bdd8057_story.html.

Human Rights Watch, "How Mass Surveillance Works in Xianjiang, China", (2019), URL: <https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2019/05/02/china-how-mass-surveillance-works-xinjiang>.

Kunming Training School Cost Alliance, "Guangdong aids Xianjiang actively promotes the transfer of aided labor force to the mainland and the effect is obvious", URL: <http://archive.ph/70yK7>.

Nebehay, Stephanie, "U.N. says it has credible reports that China holds million Uighurs in secret camps", (2018), URL: <https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/u-n-says-it-has-credible-reports-that-china-holds-million-ughurs-in-secret-camps-idUSKBN1KV1SU>.

South China Morning Post, "Made in China 2025: how Beijing plans to lead the world", (2015), URL: <https://www.scmp.com/business/china-business/series/3101581/made-china-2025-how-beijing-plans-lead-world>.